

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PETERNAKAN
TAHUN 2024 DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Ilmu Administrasi Negara*



Oleh :

**NAMA : UCI RAMADANI
NPM : 220411089**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG
PETERNAKAN TAHUN 2024 DI DESA JAYA
KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA : UCI RAMADANI
NPM : 220411089
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

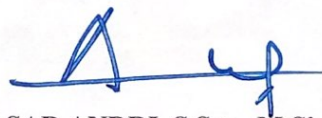
Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 10
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA


SAHRI MUHARAM, S.Sos.M.Si
NIDN. 1021117906

SEKRETARIS


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

1	EMILIA EMHARIS, S.Sos.M.Si	(Pembimbing 1)	()
3	RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si	(Anggota)	()
4	DESRIADI, S.Sos.M.Si	(Anggota)	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


SARJAN M, S.Sos.M.Si
NIDN. 100128002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : UCI RAMADANI

NPM : 220411089

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 23 juni 2026




Uci Ramadan
NPM. 220411089

MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi
tidak mungkin aku tidak ada artinya”

(Uci Ramadani)

“Walaupun tumbuh dari keluarga broken home, jangan terkurung dengan trauma
itu, masaa kecil boleh hancur, mental boleh sakit, perlihatkan siapa dirimu
bertarunglah untuk masa depan yang lebih baik.”

ANAK BROKEN HOME JUGA PUNYA HAK UNTUK SUKSES

(Uci Ramadani)

“Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah
dan berteriak MENANG”

(Diakhir Perang-Nadin Amizah)

KATA PERSEMBAHAN

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan selalu dalam lindungannya, serta shalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan "*Allahuma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad*" semoga ini menjadi salah satu langkah untuk menuju kesuksesan dan meraih cita cita besarku.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk kesayangan ku, cahaya hidupku, motivasiku, duniaku, ibuku tercinta, yang selalu memberiku semangat dan memanjatkan do'a kepada putrimu dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk ibu pengorbananmu sungguh luar biasa semoga Allah selalu melindungi menyayangi dan mengangkat derajatmu. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Terima kasih banyak untuk bapak Emilia Emharis S.Sos., M.Si dan bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses bimbingan. Serta kepada bapak ibu pengajar serta seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi, dan bantuan penelitian lainnya dalam kelancaran studi.

Terima kasih banyak untuk semuanya karena jasa kalian sangat berharga bagi saya, semoga ilmu yang saya dapatkan bias berguna di masa yang akan datang dan semoga kita dapat berkumpul di Jannah Firdaus nya kelak, Aamiin ya Rabb.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita memuji dan memuliakannya, bagaimana seharusnya dia dipuji dan dimuliakan. Kita berdoa kepada allah agar keselamatan dan keberkahan selalu tercurah buat seluruh nabi dan rasulnya, dan terkhusus yang terakhir dari segala nabinya, yakni nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang membangun bagi pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, baik dari segi materi maupun penulisannya. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas arahan dan dukungannya.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara dan sekaligus pembimbing II, yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I penulis di Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi selama proses perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah banyak mendidik penulis selama perkuliahan, karyawan dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu saya dalam mengurus surat-surat kepentingan yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan ini.
8. Pemerintahan Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin dukungan, serta data yang di butuhkan untuk menyelesaikan penulisan ini.
9. Teristimewa dan paling penting untuk Ibunda tercinta yaitu ibu **murti** yang telah membesarkan, mendidik, menjadi penyemangat dan senantiasa memberikan kasih sayang serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara kandung saya yaitu abang **Afdal Noca, S.Kep.,Ns**, abang **Pebrimon Rista, S.T** dan kakak ipar saya **Fitri Handayani, S.Keb**, beserta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun finansial.
11. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Administrasi Negara Angkatan 2022, sukses untuk kita semua

Penulis menyadari bahwa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini Berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukanya.

Teluk Kuantan, Juni 2026
Penulis

Uci Ramadani
NPM. 220411089

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
TANDA ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.4.3 Bagi Pemerintah Desa Jaya	6
1.4.4 Bagi Akademik.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Teori / Konsep Administrasi Negara.....	7
2.1.2 Teori / Konsep Kebijakan Publik	12
2.1.3 Teori / Konsep Evaluasi	16
2.1.4 Teori / Konsep Keuangan Negara	22
2.1.5 Teori / Konsep Keuangan Dana Desa	26
2.1.6 Teori / Konsep Pemerintahan Desa	28
2.1.7 Teori / Konsep Peternakan	30

2.2	Kerangka Pemikiran	32
2.3	Hipotesis Kerja	33
2.4	Definisi Operasional.....	33
2.4.1	Efektifitas	33
2.4.2	Kecukupan.....	34
2.4.3	Pemerataan	34
2.4.4	Efesiensi	34
2.4.5	Ketepatan.....	34
2.4.6	Audit.....	35
2.5	Operasional Variabel	35
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Informan.....	36
3.3	Sumber Data.....	38
3.3.1	Data Primer	38
3.3.2	Data Sekunder	38
3.4	fokus penelitian	38
3.5	Lokasi Penelitian	38
3.6	Metode Pengumpulan Data	38
3.6.1	Observasi	39
3.6.2	Wawancara	39
3.6.3	Dokumentasi.....	39
3.6.4	Triangulasi	40
3.7	Metode Analisis Data	40
3.7.1	Reduksi Data	40
3.7.2	Penyajian Data.....	40
3.7.3	Penarikan Kesimpulan	41
3.8	Jadwal kegiatan penelitian	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		43
4.1	Sejarah Desa Jaya Kopah	43
4.2	Demografi	43

4.2.1 Keadaan geografis	43
4.2.2 Luas Dan Batas Wilayah	44
4.2.3 Keadaan Penduduk	45
4.2.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
4.2.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	46
4.2.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	46
4.2.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	47
4.2.4 Tingkat Pendidikan.....	47
4.2.5 Sarana Dan Prasarana Desa Jaya	48
4.2.6 Keadaan Ekonomi	49
4.3 Kondisi Pemerintah Desa	49
4.3.1 Pembagian Wilayah Desa.....	49
4.3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)	49
4.3.3 Visi dan Misi Desa Jaya	50
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL	52
5.1 Identitas Informan	52
5.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin.....	52
5.1.2 Responden Menurut Tingkat Usia.....	53
5.1.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan	53
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	54
5.2.1 Indikator Efektivitas	54
5.2.1.1 Tujuan	54
5.2.1.2 Sasaran	60
5.2.1.3 Hasil	66
5.2.2 Indikator Kecukupan	72
5.2.2.1 Sarana	73
5.2.2.2 Alokasi Anggaran.....	79
5.2.2.3 SDM (Sumber Daya Manusia)	81
5.2.3 Indikator Pemerataan.....	83

5.2.3.1 Biaya	83
5.2.3.2 Manfaat	88
5.2.4 Indikator Efisiensi	94
5.2.4.1 Pelayanan.....	94
5.2.4.2 Kepuasan	97
5.2.4.3 Kesesuaian.....	101
5.2.5 Indikator Ketepatan	103
5.2.5.1 Tepat Waktu	104
5.2.5.2 Tepat Guna	106
5.2.6 Indikator Audit	108
5.2.6.1 Partisipasi	108
5.3 Pembahasan dan analisa Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	113
5.3.1 Indikator Efektivitas	113
5.3.2 Indikator Kecukupan	114
5.3.3 Indikator Pemerataan.....	115
5.3.4 Indikator Efisiensi	115
5.3.5 Indikator Ketepatan	116
5.3.6 Indikator Audit	117
BAB VI PENUTUP	118
6.1 Kesimpulan.....	118
6.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	3
Tabel I.2 : Rincian Anggaran Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat (Dalam Peningkatan Produksi Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah).	4
Tabel II.1 : Indikator Kriteria Evaluasi.	22
Tabel II.2 : Operasional Variabel Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	35
Tabel III.1 : Informan Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan di Desa Jaya Kopah Tahun 2024 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	37
Tabel III.2 : Jadwal kegiatan penelitian Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan di Desa Jaya Kopah Tahun 2024 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.	45
Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk berdasarkan umur.	46
Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.	46
Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	47
Tabel IV.5 : Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel IV.6 : Prasarana Desa Jaya.....	48
Tabel V. 1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel V. 2 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	53
Tabel V . 3 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	32
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Jaya Kopah.	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Daftar Wawancara Penelitian tentang Pelaksanaan Good Governance Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	
Lampiran 2 : Dokumentasi penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing.....	
Lampiran 3 : Surat Riset Penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi..... .	
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing.....	
Lampiran 5 : Catatan Bimbingan Skripsi Penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing.....	
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing	

ABSTRAK

“EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PETERNAKAN TAHUN 2024 DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

OLEH
UCI RAMADANI
NPM.220411089

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan dana desa bidang peternakan tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator evaluasi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya metode penelitian yang bersifat humanistik, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subyek utama dalam suatu peristiwa sosial. Metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi dalam mendapatkan hasil akhir dari evaluasi penggunaan dana desa bidang peternakan di desa jaya kopah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peternakan telah berjalan cukup baik, memberikan manfaat ekonomi dan mendukung ketahanan pangan masyarakat. Namun, masih ditemukan kendala berupa kurangnya pendampingan teknis, pengawasan, pemerataan bantuan, serta keterbatasan sarana pendukung peternakan. Dengan demikian, penggunaan Dana Desa bidang peternakan dinilai cukup efektif, tetapi masih memerlukan perbaikan agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci : Evaluasi, Dana Desa, Peternakan, Ketahanan Pangan

ABSTRACT

"EVALUATION OF VILLAGE FUNDS USE IN THE 2024 LIVESTOCK SECTOR IN JAYA KOPAH VILLAGE, KUANTAN TENGAH DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY"

BY

UCI RAMADANI
NPM.220411089

This study aims to determine how to evaluate the use of Village Funds in the 2024 Livestock Sector in Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study is to evaluate the use of village funds in the 2024 livestock sector in Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The indicators used in this study are evaluation indicators. This type of research is qualitative, meaning the research method is humanistic, where humans are positioned as the main subjects in a social event. The data collection method in this study uses observation, interviews, documentation, and triangulation techniques to obtain the final results of the evaluation of the use of village funds in the livestock sector in Jaya Kopah Village. The research results indicate that the livestock program has been running quite well, providing economic benefits and supporting community food security. However, obstacles remain, including a lack of technical assistance, supervision, equitable distribution of aid, and limited livestock support facilities. Therefore, the use of Village Funds in the livestock sector is considered quite effective, but still requires improvement to be more optimal and sustainable.

Keywords: Evaluation, Village Funds, Livestock, Food Security

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan sebagai puncak kekuasaan dalam rangka pembangunan daerah melalui pemerintah daerah diberi kewenangan melalui asas desentralisasi mengatur rumah tangganya sendiri untuk menekankan prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam hal ini Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menjadi landasan hukum bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus semua penyelenggaraan pemerintah untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat serta otonomi nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 tentang Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat desa, desa berhak mendapatkan dana desa dengan maksud pemberian dana desa adalah sebagai bantuan stimultan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui

peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan dalam membangun desa masing-masing.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan perkembangan kehidupan pemberdayaan masyarakat. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. (Setiawati et al. 2022). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. (Mesra et al. 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Bersumber dari Anggaran Pemerintahan Pusat yang dikhususkan untuk pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa yang diluncurkan untuk seluruh desa di Indonesia berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang direncanakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian setiap desa di bawah naungan kabupaten mempersiapkan rencana kegiatan desa yang di peruntukkan satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan desa untuk membangun sarana infrastruktur desa dan program memberdayakan masyarakat yang menunjang perekonomian, meningkat kesejahteraan dan kemandirian desa.

Tabel I.1 : Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Jaya Kopah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 428.604.495
2	Penyelenggaraan Pembangunan	Rp. 208.634.500
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 72.673.500
4	Ketahanan Pangan	Rp. 213.000.000
5	Penanggulangan Bencana	Rp. 333.897.710
Total		Rp. 1.256.810.205

Sumber: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Jaya Kopah Tahun 2024 Kecamatan kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
Perolehan dana desa yang diterima oleh Desa jaya Kecamatan Kuantan

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 sejumlah Rp. 1.256.810.205,- dimana dana tersebut paling banyak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak Rp. 428.604.495,-. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan sebanyak Rp. 208.634.500, untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebanyak Rp. 72.673.500,- untuk bidang ketahanan pangan sebanyak Rp. 213.000.000,- dan sebanyak Rp. 333.897.710,- digunakan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Dalam hal ini

peneliti fokus untuk mengkaji pemanfaatan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa jaya pada tahun 2024.

Tabel I.2 : Rincian Anggaran Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat (Dalam Peningkatan Produksi Peternakan Tahun 2024 Desa Jaya Kopah).

Uraian	Anggaran Tahun 2024		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Modal Hewan (Hewan Kerbau)	11 ekor	Rp. 18.000.000	Rp. 198.000.000

Sumber: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Jaya Kopah Tahun 2024 Kecamatan kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel I.2 Diatas diketahui total anggaran dana desa dalam peningkatan produksi peternakan tahun 2024 desa Jaya Kopah berjumlah Rp. 198.000.000. Terdapat bahwa untuk bidang peternakan kegiatan yang dilakukan adalah pembelian kerbau dengan jumlah 11 ekor di tahun 2024. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat tersebut masih minim dan tidak berjalan maksimal karena tidak adanya pengawasan dan pembinaan dari desa. Sehingga dana yang diberikan tidak mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri yakni adanya peningkatan kesejahteraan sosial.

Fenomena yang terjadi pada pembelian kerbau sebagai pengembangan peternakan di Desa Jaya Kopah bahwa masyarakat yang diberikan hewan ternak tidak dikelola secara profesional, sehingga perkembangan kerbau tidak terpantau dengan baik, karena kerbau yang sudah diberikan kepada masyarakat, namun masyarakat cara memeliharanya dengan melepaskan secara liar di perkebunan sawit Duta Palma, tidak dibuatkan kandang, sehingga kerbau tersebut akan berisiko hilang dan dicuri.

Dalam pengelolaan hewan ternak ini kurang persiapan pemerintah desa dan masyarakat, hewan yang telah diberikan tersebut tidak dibuatkan kandang dengan baik, sehingga sumber daya dari ternak tersebut tidak terkelola dengan baik, seperti kotoran baik yang padat maupun yang cair tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

Dalam pengelolaan pemerintah desa dan masyarakat tidak ada persiapan lahan untuk menanam rumput sebagai pakan bagi hewan ternak, sehingga hewan ternak yang sudah dibagikan kepada masyarakat pada akhirnya dilepas liarkan.

Selain itu, berdasarkan observasi awal di lapangan diketahui bahwa penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat tersebut juga tidak transparan. Padahal transparansi dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa.

Dari permasalahan diatas maka penulis merencanakan penelitian dengan judul “Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “ Bagaimanakah Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah evaluasi penggunaan dana desa bidang

peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan serta dapat memperluas wawasan khususnya tentang evaluasi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, menambah pengetahuan dan informasi tentang evaluasi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

1.4.3 Bagi Pemerintah Desa Jaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pengambil kebijakan dalam memaksimalkan pengalokasian dana desa.

1.4.4 Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berhubungan dengan tentang studi implementasi alokasi dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Ilmu administrasi negara adalah salah satu perhatian dan pemikiran menjadi bidang kajian utama untuk mempelajari proses kerja sama manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien dengan menggunakan instrument pengaturan sehingga melahirkan keteraturan berpikir dan bertindak.

Menurut Leonard D. White menyatakan bahwa administrasi negara adalah seluruh proses yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan publik. Administrasi negara tidak hanya mencakup birokrasi, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan publik. Dengan demikian, administrasi negara merupakan aktivitas yang bersifat kompleks dan dinamis. (Sedarmayanti 2021)

Menurut Admosoedirjo (dalam Mustanir et al. 2022) secara luas dapat dilihat dari tiga sudut pandang, sebagai berikut:

1. Arti administrasi pada institusional, administrasi diartikan sebagai seluruh orang atau kelompok yang secara bersama melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Administrasi dalam arti fungsional/tugas, administrasi adalah suatu keseluruhan kegiatan dan tindakan yang maksudnya untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain yaitu melihat pencapaian dimasa yang akan datang.

3. Administrasi sebagai proses, yaitu memiliki arti keseluruhan proses yang berupa kegiatan, pemikiran, pengaturan mulai penentuan tujuan hingga penyelenggaraan sehingga tercapai tujuan tertentu.

Max Weber memperkenalkan teori birokrasi yang menjadi dasar administrasi publik modern. Menurut Weber, birokrasi yang ideal harus memiliki struktur hierarkis, pembagian kerja yang jelas, aturan tertulis, dan profesionalisme aparatur. Model birokrasi Weber dianggap mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, birokrasi Weber juga dikritik karena dianggap terlalu kaku, lamban, dan kurang responsif terhadap perubahan masyarakat. Kritik terhadap model ini kemudian memunculkan pemikiran bahwa administrasi negara harus adaptif dan partisipatif. (Siagian 2021).

Menurut Waldo Administrasi negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintah. Administrasi negara adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara. (Mustanir et al. 2022).

Menurut Atmosudirdjo (dalam Erlianti et al. 2024) mengartikan administrasi negara dalam tiga pengertian:

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau lembaga politik (kenegaraan), yang mencakup lembaga-lembaga pemerintahan seperti presiden dan menteri (misalnya gubernur, bupati). Tujuannya adalah

untuk mencakup semua organ yang bertanggung jawab atas administrasi negara.

2. Sebagai fungsi kegiatan, khususnya sebagai kegiatan pemerintahan, yang diartikan sebagai kegiatan yang melindungi kepentingan negara.
3. Sebagai suatu proses teknis penegakan hukum, yang dimaksud dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk melaksanakannya.

Menurut Yeremias T. Keban (dalam Warsono, Astuti, and Marom 2019) menjelaskan bahwa administrasi negara hakekatnya adalah:

1. Bidang yang terutama berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga terkait dunia yudikatif dan legislatif,
2. Bidang yang berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik
3. Bidang yang berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah
4. Bidang yang diarahkan menghasilkan public goods dan services
5. Sebagai ilmu dan seni, bidang ini memiliki aspek teoritis dan praktis.

Administrasi dapat diartikan sebagai sebuah proses pengorganisasian sumber-sumber baik sumber daya manusia ataupun yang lainnya sehingga dengan adanya hal tersebut tugas masing masing orang dalam organisasi tersebut dapat dikerjakan dengan baik. Dalam sebuah proses administrasi akan ada tiga fungsi utama yang saling berhubungan erat dengan tiga tingkatan hierarki formal. Di tingkat paling atas yaitu fungsi pengarahan organisasi yang utamanya memiliki

kaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari sebuah organisasi tersebut. Di tingkat menengah yaitu fungsi manajemen organisasi yang kaitannya dengan bagaimana organisasi mempertahankan suatu pekerjaan dengan terus-menerus dan dalam jangka waktu lama. Serta pada tingkat bawah yaitu fungsi pengawas. Dimana fungsi pengawas memiliki tujuan untuk memberikan pengarahan terhadap penggunaan sumber-sumber serta memastikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. (Mustanir et al. 2022).

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai suatu konsep, administrasi adalah Universal Application. Administrasi ada bersamaan dengan munculnya umat manusia dan akan terus dipakai selama umat manusia itu masih hidup. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substantial ia adalah sama. Unsur- unsur administrasi pasti ada, sekalipun ia berada di masyarakat primitive. Ia akan bertambah canggih Bersama dengan bertambah maju dan kompleksnya masyarakat. (Mas Roro and Husni 2022).

Administrasi negara merupakan suatu bentuk seni yang tidak hanya terbatas pada birokrat profesional dalam jabatan kariernya saja, tetapi juga dilaksanakan oleh penyelenggara negara lainnya dalam menjalankan kegiatan pemerintahan negara. (Erlianti et al. 2024).

Menurut John M. Pfiffer dan Robert V Administrasi negara adalah proses yang melibatkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan, mengelola sejumlah besar kemampuan dan metode yang memberikan fokus dan arah pada upaya banyak orang. (Kencana 2008).

Menurut Sondang Paian Siagian yakni mengartikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Warsono, Astuti, and Marom 2019).

Administrasi negara adalah kegiatan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Administrasi negara merupakan kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi Negara dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan Negara terhadap berbagai kebutuhan sosial, dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien.

Menurut Ali 2015, secara terminologi apa yang disebut “administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelolah. Jika dibubuhi oleh awalan “pe” dan akhiran “an” pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adanya terciptanya keteraturan dan susunan dan pengaturan dinamikanya. Maka administrasi menurut saya adalah suatu

kegiatan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang saling bekerja sama didalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. (Mahardhani 2018).

Menurut Charles O Jones istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam kebiasaan sehari-hari kita, meskipun demikian kata tersebut bisa digunakan untuk menginterpretasikan kegiatan yang berbeda-beda. Sebagai suatu “konsep” filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu “produk”, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu “proses” kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu “kerangka kerja”, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. (Mahardhani 2018).

Sedangkan definsi dari publik merupakan terjemahan dari *public* yang secara umum diterjemahkan sebagai: orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya), serta diterjemahkan juga sebagai “rakyat”. Dalam kamus Oxford (1995: 936) kata *`public`* mempunyai makna, “*of or concering people in general; provided, esp by government, for the use of people in general; not privat; known about by money people by through*

news paper, television, etc; open or known to people in general". (Mahardhani 2018).

Menurut Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*what government do, why they do it, and what difference it makes*). (Mahardhani 2018).

Kebijakan publik merupakan output dari proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana output ini bertujuan untuk mengatur serta mengatasi segala problema atau gejolak-gejolak yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. (Rahmah and Rifka 2018).

Menurut Thomas R. Dye dan James Anderson menyebutkan bahwa ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa perlu kebijakan publik dipelajari. **Pertama**, pertimbangan atau alasan ilmiah dalam rangka menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebijakan. **Kedua**, pertimbangan atau alasan profesional dengan memberikan pemisahan antara scientific-estate yang hanya mencari untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan professional-estate, yang disandingkan bersama ilmu pengetahuan dalam rangka pemecahan masalah secara praktis. **Ketiga**, pertimbangan atau alasan politis sebagai dasar pada setiap regulasi agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. (Rahmah and Rifka 2018).

Menurut Herdiana Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Desrinelti 2021).

Menurut Iskandar (Desrinelti 2021) Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu:

1. Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama,
2. Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir. Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Menurut Jann and Wegrich (Desrinelti 2021) Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai :

1. Tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan.
2. Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri.

3. Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang.
4. Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu.

Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwet adalah unsur penting yang ada pada bidang politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu yang dilakukan didalam waktu tertentu. Kebijakan publik atau *policy public* adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat. Sehingga kebijakan publik mempelajari bagaimana untuk masyarakat itu dirancang, diimplementasikan, kemudian dipantau. (Dewi,D.suluh 2022).

Adapun arti dari James Anderson bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi permasalahan. Konsep kebijakan tersebut dalam anggap tepat dengan alasan terpusatnya perhatian sisi yang sebenarnya dilakukan dan bukan yang diusulkan. Dengan kata lain, konsep tersebut membedakan kebijakan pada keputusan berbagai pilihan. (Ravyansah 2022).

Kebijakan publik adalah pilihan yang membatasi individu pada tingkat kunci atau tata letak yang dibuat oleh pemegang kekuasaan publik. Sebagai pilihan yang mempersempit masyarakat pada umumnya, kebijakan publik harus dibuat oleh para ahli politik, khususnya individu yang mendapat perintah dari masyarakat pada umumnya atau individu, pada umumnya melalui siklus pemilu hingga tindak lanjut bagi individu. Selain itu, strategi publik akan dijalankan oleh

organisasi negara yang dikendalikan oleh administrasi otoritas publik. (Rodiyah et al. 2022).

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai, tindakan, tujuan tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu. (Pramono 2020).

2.1.3 Teori/Konsep Evaluasi

Menurut Arikunto evaluasi didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menentukan hasil telah dicapai oleh Organisasi dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan sebagian anggapan yang telah diuraikan di atas, cenderung dapat disimpulkan bahwa makna penilaian dapat diartikan sebagai objek penilaian yang menunjukkan suatu tahapan evaluasi, dimana hasil-hasilnya digambarkan sebagai data untuk menentukan kondisi penilaian item yang kemudian digunakan untuk memutuskan opsi yang tepat dalam menentukan pilihan. (Putri 2023).

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu kebijakan publik, dengan kata lain sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja, melainkan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "evaluasi kebijakan". Evaluasi kebijakan itu sendiri dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Selain itu, evaluasi diperlukan

untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan. (Pramono 2020).

Menurut Situmorang (2020) evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicitacitakan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari spesification, measurement, analisis dan rekomendasi.

Menurut Ernet R House (Pramono 2020) membuat taksonomi evaluasi kebijakan publik melalui beberapa model, yaitu:

1. Model system dengan indikator utama adalah efisiensi.
2. Model perilaku dengan indikator utama produktivitas dan akuntabilitas.
3. Model formulasi keputusan dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas.
4. Model tujuan bebas (goal free) dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial.
5. Model kekritisan seni (art criticism) dengan indikator utama standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.
6. Model review professional dengan indikator utama adalah penerimaan profesional.
7. Model kuasi-legal (quasi-legal) dengan indikator utama adalah resolusi, serta.

8. Model studi kasus dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Menurut Thoha mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh. (Putri 2023).

Menurut Arikunto evaluasi didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menentukan hasil telah dicapai oleh Organisasi dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan sebagian anggapan yang telah diuraikan di atas, cenderung dapat disimpulkan bahwa makna penilaian dapat diartikan sebagai objek penilaian yang menunjukkan suatu tahapan evaluasi, dimana hasil-hasilnya digambarkan sebagai data untuk menentukan kondisi penilaian item yang kemudian digunakan untuk memutuskan opsi yang tepat dalam menentukan pilihan. (Putri 2023).

Menurut Wibawa 1994 (dalam Mustari 2015) evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu :

1. *Eksplanasi*. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. *Kepatuhan*. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. *Audit*. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. *Akunting*. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Dunn (dalam Mustari 2015) kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari nilai moneterinya.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran untuk mendistribusikan resources dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Menurut (Meutia 2017) kriteria evaluasi kebijakan dengan demikian terdiri dari 6 aspek, yaitu:

1. Efektivitas. Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.
2. Efisiensi. Fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.
3. Adekuasi (kecukupan). Kriteria ini lebih mempersoalkan kemandirian hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atas seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.
4. Pemerataan atau Ekuitas. Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok kelompok sasaran dan penerima manfaat.
5. Responsivitas. Kriteria ini lebih menyoal aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak.
6. Ketepatan. Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran.

Menurut William Dunn dan Wibawa (dalam Mustari 2015) mengembangkan enam indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut :

Tabel II. 1 : Indikator Kriteria Evaluasi

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah ?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda ?
4	Efisiensi	Seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat ?
6	Audit	Apakah output sudah sampai ke target sasaran kebijakan?

Sumber : William Dunn dan Wibawa (dalam Mustari 2015)

2.1.4 Teori/Konsep Keuangan Negara

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai; semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 butir 1). Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan pengertian keuangan negara yang pernah dihasilkan dalam seminar Indonesische Comptabiliteit Wet (ICW) tanggal 30

Agustus – 5 September 1970 di Jakarta yang sebelumnya dalam teori hukum keuangan negara pernah pula dikemukakan oleh van der.

Mengacu pada penjelasan dalam Undang-undang ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan : Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. (Alfath 2019).

Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya. (Putra et al. 2022).

Menurut Kementerian Keuangan Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. (Putri 2023).

Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah undang-undang, sehingga merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (Paulina 2020).

Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu - baik berupa uang maupun berupa barang - yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (salle, A. Allo.k, paulus, pangayouw.J.C 2021).

Secara umum keuangan negara membicarakan masalah penerimaan anggaran atau sumber-sumber penerimaan/pemasukan kas negara untuk membiayai operasional suatu negara, serta berbagai macam pengeluaran anggarannya. (Moeljono et al. 2021).

Menurut Alrasyid apabila didefinisikan secara gramatikal atau tata bahasa, keuangan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan uang. Namun dalam konteks keuangan negara, definisi ini terlalu luas dan tak memberi kepastian hukum serta dapat menimbulkan kesulitan bagi yang melakukan pemeriksaan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun bagi pemerintah yang memberikan pertanggungjawaban. (Novianti 2015).

Namun, mantan ketua Mahkamah Agung, Profesor Wirjono, menjelaskan bahwa BPK adalah lembaga yang bertugas membantu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengontrol pemerintah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui oleh DPR. Dengan demikian, anggaran yang dimaksud di sini adalah anggaran yang telah disetujui oleh DPR.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2.1.5 Teori/Konsep Keuangan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan : Pasal 5 1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. (Mustanir and Darmiah 2016).

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa. Tujuan Dana Desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang

bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan. (Hulu et al. 2018).

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (12) tentang desa, Desa adalah semua hal dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan Kewajiban tersebut menimbulkan Pendapatan, belanja, Pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) yaitu :Transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel yaitu perwujudan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu penyelenggaraan pemerintah desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasi.

2.1.6 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Zainudin 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1, pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Zainudin 2016).

Secara historis bakat feodalisme pemerintah Desa adalah produk kolonial yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan majikan/tuannya daripada kepentingan masyarakat. (Mulyono 2014)

Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. (Endah 2014).

Pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Ini berarti bahwa pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan yang terdekat dengan masyarakat karena pemerintah desa langsung melayani masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Desa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar sesuai dengan harapan masyarakat. (Kusnendar 2018).

Menurut Surasih pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Putri 2023).

Menurut Suradinata Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kesatuan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki

sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. (Putri 2023).

Menurut Yusri (2020), Pemerintah desa harus memberikan pelayanan secara optimal kepada penduduk desanya, hal ini sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) bagian (h). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Solekhan (Ali, K. saputra 2020) menjelaskan bahwa apabila dilihat dari segi fungsinya, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.

2.1.7 Teori/Konsep Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian

peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. (Bahtiar 2020).

Peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut, peternak hendaknya menerapkan sapta usaha ternak yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. (Dikko M, Hussaini U 2021).

Peternakan adalah salah satu sektor yang banyak menyumbang terhadap ketersediaan pangan. Kebutuhan protein hewani konsumen dipenuhi melalui sector peternakan. Produk utama peternakan adalah susu, daging, telur dan bibit. Selain produk utama, peternakan memiliki produk sampingan yang nilainya tidak jauh bersaing dari nilai produk utama. (Rodiallah. and Zaki. 2016).

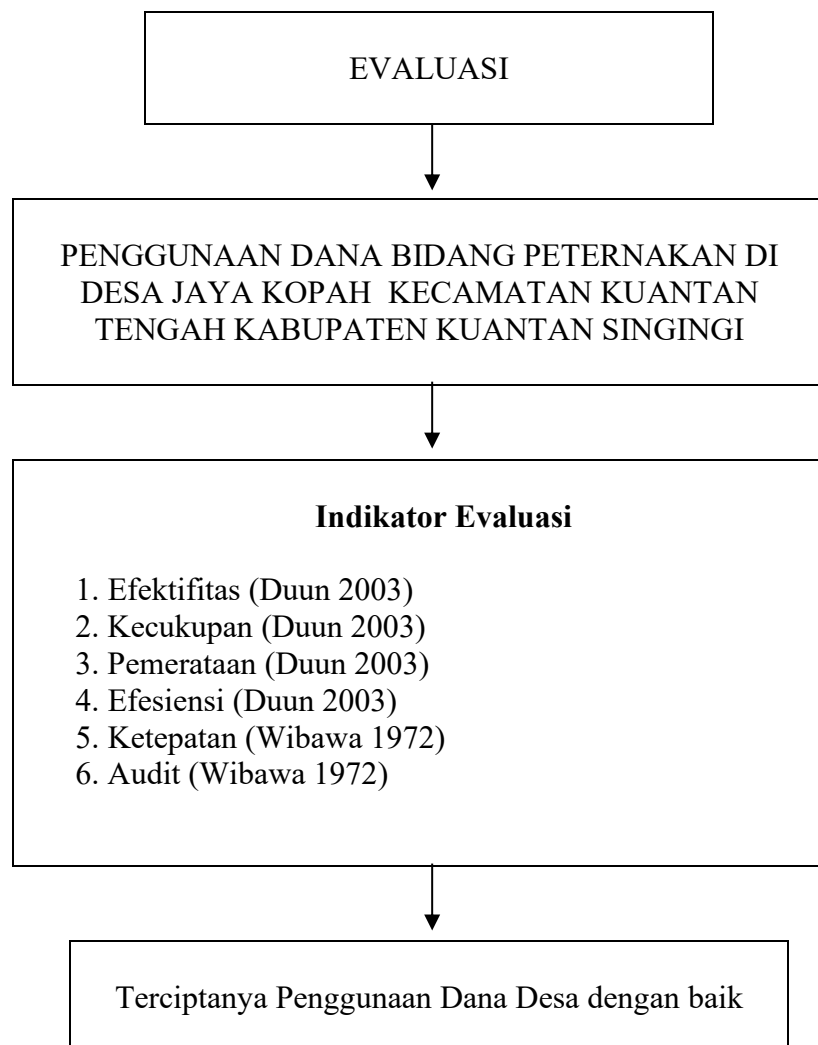
Ternak atau peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan penggemukan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Salah satu tujuan utama bidang peternakan adalah meningkatkan produktifitas ternak dengan didukung pakan yang mudah didapat, berkualitas, serta biaya yang murah.

Menurut Rasyaf 1994 Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudi dayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan.

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada factor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. (Warsito, Widodo, and Wulandari 2020).

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

2.3 Hipotesis

Apabila pengelolaan dana desa bidang peternakan dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya, apabila tidak dikelola dengan baik maka tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis merupakan suatu dugaan awal atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Disebut sementara karena jawaban tersebut masih bersifat teoritis dan belum dibuktikan melalui data empiris di lapangan. Hipotesis disusun berdasarkan teori-teori yang relevan dan akan diuji kebenarannya melalui proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian.

2.4 Definisi Operasional

Konsep Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4.1 Efektifitas

Dalam banyak penelitian evaluasi kebijakan publik, efektivitas diukur dengan membandingkan tujuan kebijakan dengan hasil aktual. Misalnya dalam studi percepatan penurunan stunting, efektivitas diartikan sebagai penurunan kasus sesuai target kebijakan. Efektivitas menjadi dasar untuk menilai seberapa

sukses suatu program dalam mencapai mission / outcome-nya. (Elisandra, Puspaningtyas, and Widiyanto 2024).

2.4.2 Kecukupan

Kecukupan menekankan bukan hanya tercapainya hasil, tetapi juga apakah hasil tersebut “cukup” untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan dasar. Dalam studi kebijakan pemuda, misalnya, kecukupan diartikan sebagai hubungan kuat antara intervensi kebijakan dengan hasil yang diinginkan, bukan hanya target minimal tercapai. (Trismuwantara et al. 2025).

2.4.3 Pemerataan

Pemerataan mengukur seberapa adil manfaat dan biaya kebijakan dibagi di antara berbagai segmen masyarakat. Banyak penelitian kebijakan publik (misalnya distribusi program bantuan) menggunakan indikator pemerataan untuk menilai apakah kelompok marginal atau rentan mendapat bagian yang layak. (Wowiling, Posumah, and Londa 2008).

2.4.4 Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari nilai moneter. (Mustari 2015).

2.4.5 Ketepatan

Ketepatan mengevaluasi apakah tujuan kebijakan itu “layak” secara nilai, sosial, dan konteks – bukan hanya seberapa baik mereka dicapai. Dalam literatur evaluasi kebijakan, ketepatan sangat penting karena mempertanyakan relevansi

tujuan program dengan nilai masyarakat dan asumsi dasar kebijakan. (Elisandra, Puspaningtyas, and Widiyanto 2024).

2.4.6 Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. (Mustari 2015).

2.5 Operasional Variabel

Tabel II. 1 Operasional Variabel Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Evaluasi	Penggunaan Dana Desa	1. Efektifitas	a. Tujuan	Ordinal
			b. Sasaran	
			c. Hasil	
		2. Kecukupan	a. Sarana	Ordinal
			b. Alokasi Anggaran	
			c. SDM	
		3. Pemerataan	a. Biaya	Ordinal
			b. Manfaat	
		4. Efisiensi	a. Pelayanan	Ordinal
			b. Kepuasan	
			c. Kesesuaian	
		5. Ketepatan	a. Tepat Waktu	Ordinal
			b. Tepat Guna	
		6. Audit	a. Partisipasi	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistik, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subyek utama dalam suatu peristiwa sosial. Dalam hal ini hakikat manusia sebagai subyek memiliki kebebasan berfikir dan menentukan pilihan atas dasar budaya dan sistem yang diyakini oleh masing-masing individu. (Safrudin et al. 2023).

Pengertian metode survei menurut Nazir adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode survey membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. (Putri 2023).

Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Putri 2023).

3.2 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan kunci umumnya

adalah seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. (Rahman 2010).

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Subjek penelitian yang bercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja, subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi selama proses penelitian. Menurut Bungin Informan penelitian kualitatif adalah subjek yang memahami informasi objek sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. (Rukajar 2021).

Tabel III.1 : Informan Penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No.	Unsur informan	Jumlah		Persentase %
		Informan	Key informan	
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Sekretaris Desa	1	1	100%
3.	Kaur Keuangan	1	1	100%
4.	Kadus Linjuang	1	1	100%
5.	Masyarakat pemelihara ternak	11	11	100%
Jumlah		15	15	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

Teknik penarikan informan dapat dilakukan melalui *purposive sampling* dan *sampling kuota*. Dalam *purposive sampling*, peneliti menetapkan kriteria khusus berdasarkan tujuan penelitian. *Purposive sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, Sedangkan dalam *sampling kuota* merupakan teknik penarikan sampel secara keseluruhan populasi dijadikan sampelnya.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang di gunakan, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau responden. Data primer bisa didapatkan lewat wawancara langsung maupun wawancara tak langsung, observasi, diskusi terfokus, dan penyebaran kuisioner. (Arviyanda, Fernandito, and Landung 2023).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui sebuah perantara. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. (Arviyanda, Fernandito, and Landung 2023).

3.4 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang evaluasi penggunaan dana desa bidang peternakan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Dusun Murbai, Desa Jaya Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Menurut Kristanto menyatakan bahwa observasi adalah suatu metode yang melibatkan pendokumentasian dan kemudian mempelajari secara cermat berbagai peristiwa baik dalam lingkungan alamiah maupun buatan manusia dengan cara yang metodis, logis, objektif, dan masuk akal. Menerapkan metode observasi merupakan salah satu cara untuk mempelajari atau mengkaji perilaku nonverbal. (Aisyah, S.Sari, N, Aprisilia, Y 2025).

3.6.2 Wawancara

Menurut Yusuf Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah Wawancara. Definisi dasar wawancara adalah setiap situasi di mana dua orang, biasanya satu pewawancara dan satu orang yang diwawancarai, terlibat dalam percakapan untuk memperoleh informasi dari satu sama lain. (Aisyah, S.Sari, N, Aprisilia, Y 2025).

3.6.3 Dokumentasi

Studi dokumentasi atau metodologi adalah cara untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber historis, seperti buku-buku tentang ide, teori, proposisi, atau hukum, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian Anda. Alasan utama untuk menggunakan pandangan, ide, atau hukum untuk mendukung atau membantah hipotesis adalah untuk memberikan bukti yang logis dan masuk akal dari hipotesis tersebut. Hal ini terutama berlaku dalam penelitian kualitatif. (Aisyah, S.Sari, N, Aprisilia, Y 2025).

3.6.4 Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam teknik triangulasi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. (Sugiyono 2014).

3.7 Metode Analisis Data

Analisis Data merupakan proses untuk menemukan dan menyusunnya secara tertata terhadap data hasil catatan, wawancara dan observasi atau dokumen untuk meningkatkan pemahaman seorang peneliti terhadap topik yang sedang diteliti dan menjelaskan kepada orang lain sebagai temuan. (Qomaruddin 2024).

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah menjadi informasi yang bermakna dan terstruktur. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian, di mana peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, dan transformasi data dari catatan lokasi yang kompleks menjadi rangkuman sistematis yang dapat membantu memahami fenomena yang diteliti. (Qomaruddin 2024).

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam

bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti. (Qomaruddin 2024).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan. Tujuan dari pengambilan kesimpulan ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada hasil data yang diperoleh dalam penelitian bukan berdasarkan keinginan dari peneliti itu sendiri. Pengambilan kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan beberapa cara, yaitu memikirkan kembali selama penulisan, meninjau kembali catatan yang diperoleh di lokasi, mengkaji ulang dan berdiskusi dengan kawan sejawat dalam upaya menjabarkan kesepakatan intersubjektif, dan usaha keras untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. (Qomaruddin 2024).

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan di Desa Jaya Kopah Tahun 2024 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal																								
2	Pembuatan Proposal	X	X	X	X																				
3	Bimbingan Proposal							X	X	X															
4	Seminar Proposal									X															
5	Revisi Proposal																								X
6	Pembuatan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Skripsi																								
9	Revisi Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Jaya Kopah

Desa Jaya Kopah adalah salah satu desa dari 6 desa di kenegrian kopah. Diantaranya yaitu desa Koto Tuo, Koto Tongah, Jaya, Munsalo, Pulau Baru, Titian Modang. Pemekaran Desa Jaya pada tahun 1982, Desa Jaya merupakan Desa pertumbuhan yang wilayah luas di 6 Desa Kenegerian Kopah dan penduduk terbanyak di banding dengan Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah.

Desa Jaya dalam kepemimpinan dan panutan masyarakat pada 2 periode di pimpin oleh Syamsuman (Alm), dilanjutkan melalui pemilihan oleh rakyat terpilih Nursaman masa bakti 6 tahun, kemudian periode selanjutnya di pimpin oleh Amir Usman (Alm) selama 8 tahun, Pada tahun 2006 s/d 2012 di pimpin oleh Erdison dan sekretaris desa Rahman Ali, Pada tahun 2012 s/d 2019 Desa Jaya Di Pimpin oleh Setiadi Yendra dengan Sekretaris Desa Yanto. dan saat ini dipimpin oleh Matnur, S.E dengan Sekretaris Desa Hapli Nurmi Hizkil, S.Tr.Kom Pada tahun 2025 desa Jaya terpilih sebagai peringkat ke II Desa terbaik Se-kuansing (SK bupati).

4.2 Demografi

4.2.1 Keadaan Geografis

Desa Jaya Kopah merupakan salah satu Desa yang berada diwilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini berada di tengah Kecamatan Kuantan Tengah. Adapun yang menjadi batas-batas wilayah di

Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

4.2.1.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Munsalo Kopah

4.2.1.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Titian Modang Kopah

4.2.1.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kopah.

4.2.1.4 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Titian Modang

4.2.2 Luas dan batas wilayah

Desa Jaya Kopah merupakan salah satu dari 23 Desa di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan mempunyai luas wilayah seluas ± 109 Ha. Desa Jaya Kopah terletak lebih kurang 8 Km dari pusat kota Kabupaten Kuantan Singingi dari kota Kecamatan. Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki orbitasi (jarak tempuh dari Pusat Pemerintahan) yaitu :

4.2.2.1 Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat : 5 Km

4.2.2.2 Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 15 Menit

4.2.2.3 Jarak ke ibu kota Kabupaten : 5 Km

4.2.2.4 Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 15 Menit

Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini terdiri dari 3 dusun dan baru-baru ini di mekarkan menjadi 4 dusun yaitu Dusun Linjuang, Dusun Murbai, Dusun Marimbungan dan Dusun Bukit Termenung, dan pola tata dusun dipengaruhi oleh keadaan geografisnya yang merupakan daerah yang terletak dipertengahan kecamatan, yaitu pola perkembangan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti jalan desa

Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Keadaan iklim di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tropis dimana terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

4.2.3 Keadaan penduduk

Jumlah penduduk di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 1.569 jiwa. Penduduk Desa Jaya Kopah merupakan penduduk berasal dari beberapa suku. Diantaranya Suku Melayu, Suku Patopang, Suku Paliang dan Suku Caniago. Penduduk Desa Jaya Kopah sangat berhubungan baik dengan kelompok suku yang ada jumlah penduduk Desa Jaya Kopah berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 765 orang laki-laki dan 804 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

4.2.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun Jumlah Penduduk Desa Jaya Menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
1.	Laki-laki	764	49%
2.	Perempuan	804	51%
Jumlah Total		1568	100%

Sumber : Data Penduduk Desa Jaya Kopah 2026

Berdasarkan tabel IV.1 diatas menunjukkan jumlah penduduk masyarakat Desa Jaya Kopah lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Adapun jumlah laki-laki 765 orang dengan presentase 49% sedangkan jumlah perempuan 804 orang dengan presentase 51%.

4.2.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Jumlah penduduk Desa Jaya Kopah berdasarkan umur dapat kita lihat tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Kelompok usia	Jumlah	Presentase %
1.	00 – 10 Tahun	138	9%
2.	11 – 20 Tahun	225	14%
3.	21 – 30 Tahun	725	46%
4.	31 Tahun ke atas	480	31%
Jumlah total		1568	100%

Sumber : Desa Jaya Kopah 2026

Dari tabel IV.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Jaya Kopah yang berusia kurang dari 00 – 10 tahun sebanyak 138 orang (9%), penduduk yang berumur antara 11 – 20 tahun sebanyak 225 orang (14%), penduduk yang berumur antara 21 – 30 tahun sebanyak 725 orang (46%) dan penduduk yang berusia lebih dari 31 tahun sebanyak 480 orang (31%).

4.2.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama adalah sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari seseorang dan keyakinannya. Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah agama. Berikut jumlah penduduk Desa Jaya berdasarkan agama dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase %
1.	Islam	1569	100%
2.	Kristen	-	-
3.	Hindu	-	-
4.	Budha	-	-
5.	Khonghucu	-	-
Jumlah Total		1569	100%

Sumber : Desa Jaya kopah 2026

Dari tabel IV.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Jaya mayoritas beragama Islam dengan jumlah 1569 orang dengan persentase 100%.

4.2.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Karena Desa Jaya merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai Desa pertanian, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	667
2.	Pedagang	94
3.	ASN	87
4.	Buruh	43
Jumlah Total		891

Sumber : Desa Jaya Kopah 2026

Dari tabel IV.4 diatas dilihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Jaya Kopah adalah sebagian petani yaitu sebanyak 667 orang, pedagang sebanyak 94 orang, ASN sebanyak 87 orang, dan Buruh sebanyak 43 orang.

4.2.4 Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping ini penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf hidupnya selalu meningkat. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan lambannya kenaikan taraf hidup dan akibatnya kemajuan menjadi terhambat. Adapun data tingkat pendidikan masyarakat Desa Jaya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	458
2.	SMP/SLTP	349
3.	SMA/SLTA	302
4.	Sarjana	102
5.	Tidak Sekolah	105
6.	Pra Sekolah	252
Jumlah Total		1.568

Sumber : Desa Jaya Kopah 2026

Dari tabel IV.5 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Jaya Kopah pada tingkatan SD berjumlah 458 orang, pada tingkatan SMP/SLTP berjumlah 349 orang, pada tingkatan SMA/SLTA berjumlah 302 orang, pada tingkatan Sarjana berjumlah 102 orang, kemudian tidak sekolah berjumlah 105 orang dan pra sekolah berjumlah 252 orang.

4.2.5 Sarana dan Prasarana Desa Jaya

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat menunjang dari tingkat keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik suatu daerah. Adapun Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Jaya secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6 Prasarana Desa Jaya

No	Prasarana Desa	Jumlah
1.	Kantor Desa	1
2.	Sekolah	3
3.	Rumah Ibadah	6
4.	Jalan Kecamatan	1
Jumlah Total		11

Sumber : Desa Jaya Kopah 2026

Dari tabel IV.6 diatas dapat dilihat bahwa di Desa Jaya terdapat Sarana dan Prasarana yaitu Kantor Desa berjumlah 1, terdapat 3 Sekolah, lalu 6 Rumah Ibadah dan 1 Jalan Kecamatan.

4.2.6 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Jaya secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariaannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor PNS Pemerintahan Daerah, Honorer, Guru dan Tenaga Medis.

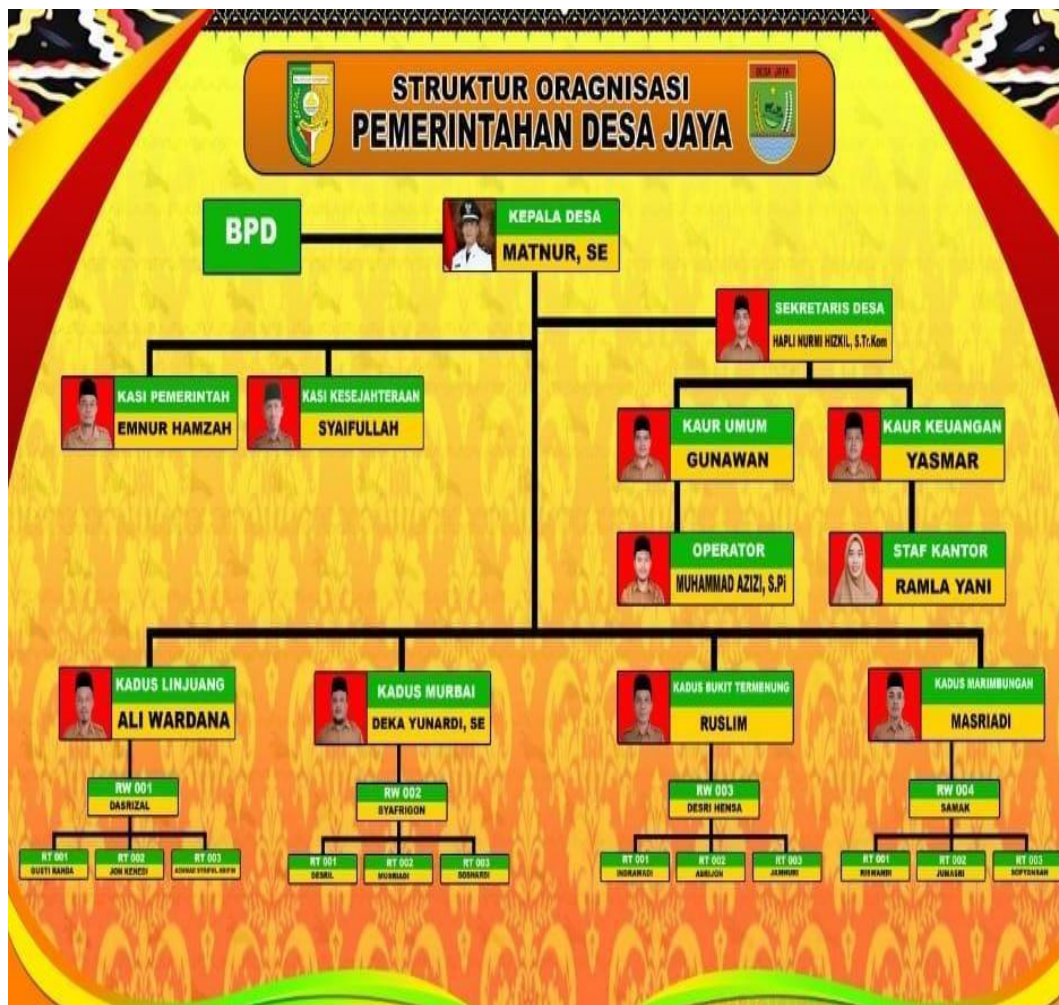
4.3 Kondisi Pemerintah Desa

4.3.1 Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Jaya dibagi menjadi 3 dusun dan baru baru ini di mekarkan menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Murbai, Dusun Linjuang, Dusun Marimbungan dan Dusun Bukit Termenung. Dimana setiap dusun mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di Dusun Murbai, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus) dan dibantu oleh 3 (tiga) orang RT serta 1 (satu) orang RW.

4.3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola Minimal selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar IV.1 : Strukur Organisasi Pemerintahan Desa Jaya Kopah

4.3.3 Visi dan Misi Desa Jaya

Visi adalah suatu cita-cita yang akan dicapai tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Jaya ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa, BPD, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Jaya adalah:

VISI : Terwujudnya desa jaya menjadi desa yang mandiri, terpadang dan terbilang di Kecamatan sampai ke Kabupaten/Provinsi bahkan ke tingkat Nasional.

MISI : Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, meskipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Jaya sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Jaya adalah :

4.3.3.1 Menerapkan manajemen terbuka/manajemen masjid

4.3.3.2 Mengedepankan kejujuran

4.3.3.3 Perangkat desa yang solid

4.3.3.4 Memprioritaskan hal-hal urgen atau prioritas

4.3.3.5 Menumbuhkan kebersamaan dan kepedulian

4.3.3.6 Memberikan pelayanan terbaik

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program peternakan desa secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun masih diperlukan peningkatan pembinaan, pengawasan, pemerataan anggaran, serta pendampingan teknis agar program peternakan desa dapat berkembang lebih optimal dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peternakan Tahun 2024 di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

6.2.1 Diharapkan kepada Pemerintah Desa Jaya Kopah dapat meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap masyarakat peternak agar ternak dapat berkembangbiak dengan baik, program bisa terarah, dan berkelanjutan.

6.2.2 Diharapkan kepada Pemerintah Desa Jaya Kopah dapat meningkatkan transparansi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dana desa bidang peternakan agar tercipta kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

- 6.2.3 Diharapkan kepada masyarakat peternak dapat menjaga dan memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam pemeliharaan ternak agar tujuan program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
- 6.2.4 Diharapkan kepada Pemerintah Desa Jaya Kopah dalam pelaksanaan program selanjutnya, supaya bisa meningkatkan pemerataan bantuan agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat program ini, khususnya masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lemah dan belum memiliki ternak.
- 6.2.5 Diharapkan kepada Pemerintah Desa Jaya Kopah untuk mempertahankan ketepatan pelaksanaan program sesuai perencanaan serta melakukan evaluasi berkala agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan tujuan program peternakan.
- 6.2.6 Diharapkan kepada Pemerintah Desa Jaya Kopah dan masyarakat untuk selalu meningkatkan partisipasi dalam program ini agar terwujudnya tujuan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aisyah, S.Sari, N, Aprisilia, Y, Fitriani. 2025. “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif :”
- Alfath, M Halim. 2019. “Keuangan Negara Dan Keuangan Publik.”
- Ali, K. saputra, A. 2020. “Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Bahtiar, Muhammad Irfandi. 2020. “Analisis Kelayakan Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi Pada Peternakan Bapak Sumali Di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang).
- Desrinelti, D. 2021. “Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan.”
- Dewi,D.suluh, k. 2022. “Buku Ajar Kebijakan Publik.” UM Jakarta
- Elisandra, Daniela, Anggraeny Puspaningtyas, and M Kendry Widiyanto. 2024. “Evaluasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.”
- Endah, K. 2014. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kiki Endah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln . RE . Martadinata No 150 Ciamis.”
- Erlianti, Dila, Agus Hendrayady, Universitas Maritim, Raja Ali, and Anny Riwayati. 2024. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA (Teori Dan Praktik).
- Kusnendar, A. 2018. “Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*: 1–8. Mahardhani, A. Januar. 2018. *Advokasi Kebijakan Publik*. ponorogo.
- Mas Roro, Lilik Eko Wati, and Thamrin Husni. 2022. *Pengantar Ilmu Administrasi Neagara*.
- Meutia, Intan Fitri. 2017. *Analisis Kebijakan Publik Analisis Kebijakan Publik*.
- Moeljono, Beta Uliansyah, Rosdiana Sijabat, and Vita Sarasi. 2021. *Keuangan*

Negara.

Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2014. "SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA."

Mustanir, Ahmad, Muhammad Rais Rahmat Razak, Edoardus Koisin, Erfina, Mochamad Rizki Fitrianto, Ayu Lestari, Nanda Dwi Rizkia, et al. 2022. Birokrasi Administrasi Pengantar Ilmu Administrasi Publik.

Mustari, Nuryanti. 2015. "Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)." Kebijakan Publik Deliberatif .

Pramono, Joko. 2020. Kebijakan Publik Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik.

Qomaruddin, Sa'diyah.H. 2024. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif."

Ravyansah, sukarman.P. 2022. Kebijakan Publik. padang sumatra barat.

Rodiallah., Yendraliza., and Muhammad Masitah Zaki. 2016. Buku Daras Pengantar Ilmu Dan Industri Peternakan.

Rodiyah, Isnaini, M Si, Ilmi Usrotin Choiriyah, M Ap, Hendra Sukmana, and M Kp. 2022. "BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK Diterbitkan Oleh : UMSIDA Press UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO."

Salle, A. Allo.k, Paulus, Pangayouw.J.C, Bill. 2021. "Keuangan Negara Dan Daerah."

Sedarmayanti. 2021. Reformasi Birokrasi Dan Good Governance. Bandung: Refika Aditama.

Setiawati, S, R Hidayat, O Suryadi, N N Hakikiah, and ... 2022. "IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA (Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran)."

Siagian, S P. 2021. Administrasi Dan Birokrasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , Dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Trismuwantara, Moh Gunawan, Sapto Pramono, Sri Roekminiati, and Aris Sunarya. 2025. "Evaluasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pemuda Oleh DISPORA Surabaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Dan Kualitas Olahraga Dan Kesehatan Pemuda . Penelitian Yang Dilakukan Oleh Kementerian Pemuda Dan Olahraga."

Warsono, Hardi, Retno Sunu Astuti, and Aufarul Marom. 2019. "Buku Ajar Teori Administrasi." *Ilmu Administrasi dan Ilmu Administrasi Negara*: Surabaya:Erlangga.

Wowiling, Vanda G, Hanny J Posumah, and Very Y Londa. 2008. "EVALUASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PROGRAM BERAS SEJAHTERA DI DESA TOLOK 1 KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA."

B. JURNAL

Arviyanda, Radiko, Enrico Fernandito, and Prabu Landung. 2023. "Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1(1): 67.

Dikko M, Hussaini U, Alkali Z et. 2021. "The Moderating Effect of Corporate Governance in the Relationship Women Owned Enterprises: A Proposed Conceptual Framework." *FUDMA JOURNAL OF MANAG2EMENT SCIENCES* (2009): 167–86.

Hulu, Yamulia, R Hamdani, Harahap Muhammad, and Arif Nasution. 2018. "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa."

Mesra, Romi, Agustien Cherly Wereh, Marven A Kasenda, and Stience Sidayang. 2023. "Efektivitas Penyaluran Dana Desa Pada Bidang Peternakan Dan Pertanian Di Desa Rumoong Atas Dua, Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7(2): 2598–9944.

Mustanir, Ahmad, and Darmiah Darmiah. 2016. "Implementasi Kebijakan Dana

Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.” Jurnal Politik Profetik 4(2): 225–38.

Paulina, Y. 2020. “Amtiran and Molidya/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME’s) Vol. 12, No.2, 2020, P203-214.”

Putra, Hidayat Cahyono, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Gunung Djati. 2022. “Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK) Volume 2 , Nomor 2 , Desember 2022.

Putri, D. yulia. 2023. “Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.”

Rahmah, Mutia, and Marta Dwi Rifka. 2018. “Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.” Jurnal Kebijakan Pemerintahan: 137–54.

Rukajar. 2021. “Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah.” Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia 1(2): 2775–4693.

Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. 2023. “Penelitian Kualitatif.” Journal Of Social Science Research 3(2): 1–15.

Situmorang, H.chazali. 2020. “TheJournalish : Social and Government KEBIJAKAN PUBLIK.” 1: 34–38.

Warsito, Sunaryo Hadi, Oky Setyo Widodo, and Shelly Wulandari. 2020. “Pengetahuan Manajemen Peternakan Dan Pemanfaatan Hasil Ternak Sebagai Sumber Gizi Masyarakat Di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.” Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services).

Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. 2020. 7 Jurnal Ilmu Pendidikan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Revolusi Industri 4.0.

Zainudin, A. 2016. “Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah.

DOKUMENTASI

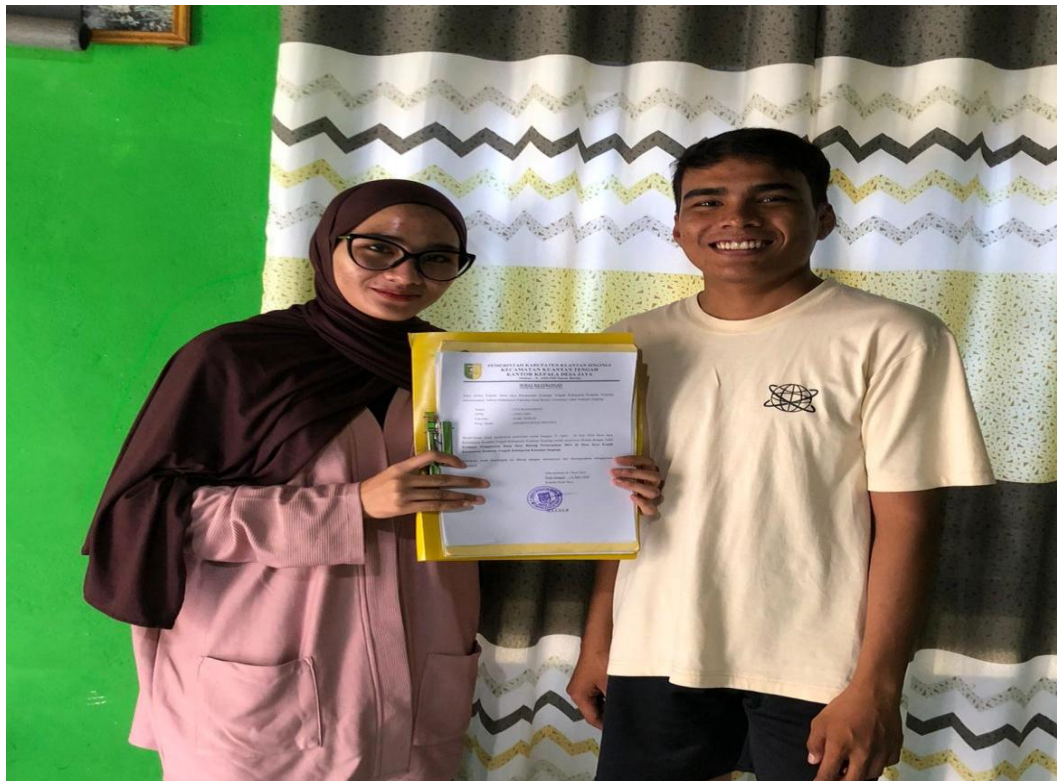


Kantor Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi



Wawancara Dengan Kepala Desa Jaya Kopah (Bapak Matnur, S.E)









Dokumentasi Wawancara, Pembagian, Dan Sekaligus Monitoring
ProgramPternakan Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR 047/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

- a. Pembimbing I : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN : 1002059002
- a. Pembimbing II : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN : 1005108901

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Uci Ramadani
NPM : 220411089

Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Produksi Peternakan di Desa Jaya Kopah Tahun 2023

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmtsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmtsp.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 132/DPMTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:054/FIS/UNIKS/PMH/IV/2026 Tanggal 21 APRIL 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : UCI RAMADANI
NIM : 220411089
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : TELUK KUANTAN
Judul Penelitian : "EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG
PERTENAKAN TAHUN 2024 DIDESA JAYA KOPAH
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di : KANTOR DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 24 April 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA JAYA**

Alamat : Jl. ADD-PID Dusun Murbai

SURAT KETERANGAN
NOMOR:190/SK-DJ/V/2026

Saya selaku Kepala Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi,
menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi :

Nama : UCI RAMADANI
NPM : 220411089
Fakultas : ILMU SOSIAL
Prog. Studi : ADMINISTRASI NEGARA

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 27 April - 20 Mei 2026 Desa Jaya
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyusun Skripsi dengan Judul
**Evaluasi Penggunaan Dana Desa Bidang Perternakan 2024 di Desa Jaya Kopah
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di: Desa Jaya

Pada tanggal : 21 Mei 2026

Kepala Desa Jaya,



MATNUR



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Uci Ramadani

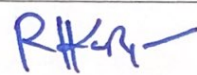
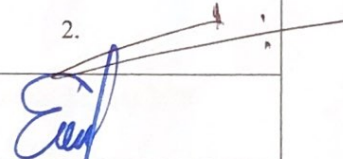
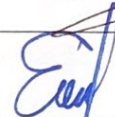
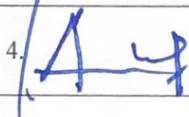
NPM : 220411089

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Evaluasi Penggunaan dana Desa Bidang Perternakan Tahun 2024 di Desa
Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Rabu, 10 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Desriadi, S.Sos., M.si	Sekretaris Dewan Sidang	2. 
3.	Emilia Emharis, S.Sos., M.si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3. 
4.	Alsar Andri, S.Sos.,M.si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Uci Ramadani

Tempat/Tanggal Lahir : Jaya Kopah/11 Desember 2004

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jaya Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten
Kuantan Singingi

Pendidikan : 1. Tahun 2016 LULUS SD Negeri 017 Jaya Kopah
2. Tahun 2019 LULUS SMP Negeri 5 Teluk Kuantan
3. Tahun 2022 LULUS SMA Negeri 2 Teluk Kuantan



Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 22 Juni 2026

Penulis

UCI RAMADANI
NPM.220411089